

I. PENDAHULUAN

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Sebagai dokumen yang memuat arahan program dan kegiatan tahunan, RKPD mempunyai peran sebagai pedoman dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, termasuk di dalam penyelenggaraan pemerintah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut menuntut pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah supaya tercapai layanan yang lebih cepat dan efisien dengan menerapkan *e-government*.

Blueprint Jogja Cyber Province yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006, merupakan landasan pengembangan dari penerapan *e-government* sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang telah dicanangkan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2002. Kebijakan *Jogja Cyber Province* di Pemerintah Daerah DIY membawa akibat perlunya transformasi model pemerintahan menuju konsep model pemerintahan *citizen centric*.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sektor komunikasi dan informatika dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintah daerah menjadi strategis karena diharapkan dapat mengakselerasi upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing dalam rangka mewujudkan DIY sebagai pusat pertumbuhan Jawa bagian Selatan maupun *economic hub* bagi provinsi lainnya di Indonesia.

II. GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Umum

Sektor komunikasi dan informatika mempunyai dua ruang lingkup pelayanan, yaitu pelayanan keluar dan pelayanan kedalam.

- Pelayanan keluar dimaksudkan untuk mendukung model pemerintah *citizen centric* atau pemerintahan yang lebih berorientasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup pelayanan keluar antara lain:
 - 1) *Digital Governement Services* (DGS);
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat Informasi
 - 3) Pelayanan Informasi Publik
- Pelayanan kedalam merupakan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani di lingkungan pemerintah DIY. Ruang lingkup pelayanan kedalam meliputi:
 - 4) Intranet dan Komunikasi Internal
 - 5) Sistem Informasi Manajemen

2.1.1. *Digital Government Services* (DGS)

DGS merupakan langkah awal untuk menuju *Jogja Cyber Province* sebagai inisiatif yang dikembangkan guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya. Program DGS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Dalam hal ini teknologi informasi (TI) tidak hanya mendukung kerja pemerintahan dan memungkinkan (*enable*) peningkatan kualitas layanan pemerintahan, tetapi TI masuk juga ke dalam kehidupan masyarakat (antara lain: pendidikan, pariwisata, perhubungan, pertanian, perikanan, perindustrian, kesehatan, tenaga kerja, dsb). Dalam hal ini, teknologi informasi berfungsi sebagai *driver* pembangunan.

Setelah Badan Informasi Daerah DIY sebagai *leading sector* pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Daerah DIY dilebur dan fungsi komunikasi dan informatikanya digabungkan ke Dinas Perhubungan DIY menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY dirasakan program DGS agak sedikit meredup. Dalam konteks demikian sangat diperlukan adanya revitalisasi kembali dengan adanya suatu lembaga yang dapat mendorong perubahan manajemen dan budaya TI di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Sejalan dengan hal itu untuk menjamin pengembangan DGS agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, *Blueprint* DGS merumuskan beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian serius dari para pengambil kebijakan atau Pucuk Pimpinan di Pemerintah Daerah DIY. Salah satunya adalah menyangkut masalah kelembagaan yang berfungsi sebagai penggerak transformasi dan inovasi dalam pelaksanaan DGS, diperlukan adanya kerangka strategi pengembangan TI dan pembagian tugas koordinasi yang jelas antar dinas/instansi. Termasuk didalamnya tugas pokok dan fungsi di urusan komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY, sehingga diharapkan masing-masing institusi yang ada akan memahami tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka DGS seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1.
Kerangka DGS

Sumber: Dokumen *Updating Jogja Cyber Province*, 2011

Dari gambar kerangka DGS dapat dijelaskan bahwasannya untuk melaksanakan program DGS perlu dibangun landasan kerja yang kuat dan dijalankan secara konsisten, sehingga diperlukan pilar percepatan yang berbasis teknologi informasi sebagai akselerator pencapaian tujuan. Pilar percepatan tersebut terdiri dari:

1) Layanan Unggulan (Strategis);

Merupakan layanan pemerintah unggulan sebagai akselerator pencapaian tujuan. Layanan unggulan sarat dengan inovasi atau hal baru yang bernilai tambah kepada pelayanan yang telah ada pada saat ini, misalnya untuk mempercepat proses, mengakselerasi pertumbuhan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keluaran;

2) Layanan Operasional;

Adalah proses atau fasilitas untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas, misalnya fasilitas perijinan, konsultasi, penyuluhan, pelatihan, dll.;

3) Layanan Pendukung;

Merupakan proses atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, misalnya sistem kepegawaian, keuangan, pengadaan, dll.;

4) Teknologi dan IT Governance;

Menjadi tulang punggung penyelenggaraan layanan berbasis pengetahuan. Infrastruktur TI tidak hanya berupa media komunikasi atau jaringan komputer, namun juga termasuk didalamnya platform, sistem operasi, fasilitas pengamanan, manajemen identitas, akses, otentikasi, otorisasi, dll.;

5) Pengelola Layanan TI;

Yaitu lembaga dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY (sebagai pengganti dari Badan Informasi Daerah) yang mengoperasikan dan mengelola komponen teknis layanan masyarakat untuk digunakan bersama oleh berbagai instansi (*shared services*). Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY bekerjasama dengan unit kerja teknis terkait;

6) *Change Management* dan *Innovation Group*;

Merupakan kelompok yang mestinya berada dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang khusus melaksanakan kegiatan inovasi, transformasi layanan dan menjadi agen perubahan (*change agent*). Kelompok ini terdiri dari (1)Kelompok *Change Management* yang melaksanakan kegiatan komunikasi, *awareness*, persuasi kepada unit kerja terkait untuk mengimplementasikan hasil kegiatan Kelompok *Innovation* dan (2)Kelompok *Innovation* yang terus menerus berinovasi pada area-area Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran, Proses Bisnis dan Layanan, Teknologi termasuk didalamnya adalah inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya (SDM dan Pembiayaan), Implementasi dan Monitoring;

7) *ICT Training Center*;

Sebagai fasilitator kegiatan pelatihan *ICT* untuk berbagai kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat secara luas dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah dan masyarakat dalam berinformasi.

Program DGS di DIY dimulai tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* yang berisi 6 layanan berbasis digital unggulan Pemerintah Daerah DIY yaitu layanan unggulan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; bidang perdagangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; bidang pariwisata; bidang

pertanian, bidang perikanan dan kelautan; dan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Pada tahun 2011 dilakukan *updating Blueprint Jogja Cyber Province* dengan menambahkan 3 layanan berbasis digital unggulan Pemerintah Daerah DIY yaitu bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; bidang kesehatan; dan bidang kerjasama dan penanaman modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Layanan Berbasis Digital Unggulan Pemerintah Daerah DIY
Sumber: Dokumen *Updating Jogja Cyber Province*, 2011

Satu hal yang penting difahami, penerapan teknologi informasi ke pemerintahan dan masyarakat tidak akan lancar tanpa ada upaya untuk mengawal perubahan agar yang direncanakan dapat terwujud. Untuk itu, Pemerintah Daerah DIY mulai awal 2007 telah membentuk Tim Manajemen Perubahan dan Inovasi Implementasi DGS (disingkat TiMPIO-DGS). TiMPIO beranggotakan berbagai instansi karena memang DGS menuntut tradisi kerja tim yang *cross-functional*. Masih banyak tantangan yang perlu dilalui agar perubahan yang kita inginkan dapat terwujud. Kesabaran, kegigihan, pendampingan, *pilot-projects* diperlukan sekali karena perubahan tidak akan datang begitu saja melainkan proses perubahan perlu dikelola dengan baik.

2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat Informasi

Pemberdayaan masyarakat informasi merupakan lingkup pelayanan keluar sektor komunikasi dan informatika yang diampu oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi (PMI) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY. Layanan informasi publik dalam rangka pemberdayaan masyarakat informasi antara lain adalah:

1. Sosialisasi dan diseminasi;
2. Forum komunitas masyarakat informasi; dan
3. Penyerapan dan pengelolaan aspirasi dan opini publik.

Berikut ini merupakan uraian gambaran umum dari masing-masing layanan.

1) Sosialisasi dan Diseminasi

Layanan sosialisasi dan diseminasi informasi publik dilakukan dengan beberapa media yaitu: *Moblle Community Acces Point* (MCAP); media elektronik; pertunjukan rakyat (pertunra); dan tatap muka.

- *Moblle Community Acces Point* (MCAP)

Untuk memperkecil kesenjangan digital di DIY, Pemerintah Daerah DIY dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Kesenjangan digital terjadi karena terbatasnya kemampuan

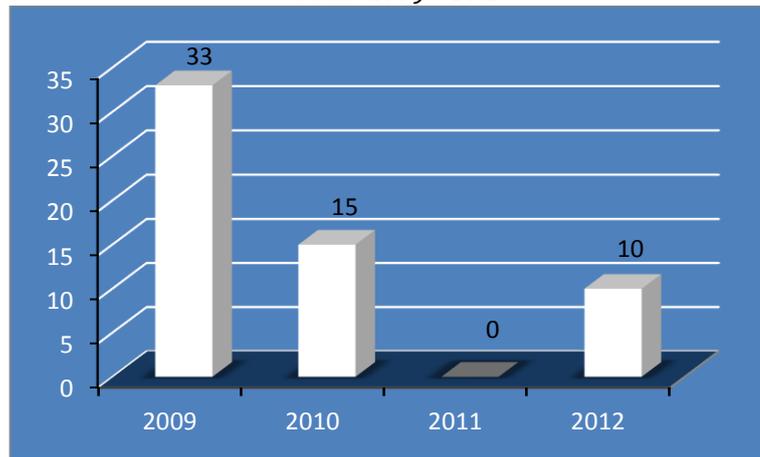
finansial dan teknis bagi sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial tinggi dan berpendidikan tinggi menjadi diuntungkan dengan ketersediaan informasi tersebut. Masyarakat yang berpenghasilan, berpendidikan rendah dan terpencil tidak merasakan manfaatnya era keterbukaan dan globalisasi seperti sekarang ini. Akibat perbedaan ini, kesenjangan keduanya menjadi semakin besar.

Sebuah terobosan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi yang diusahakan dan didorong Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bekerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY) yaitu dengan pengoperasian *Mobile Community Access Point* (MCAP) di DIY. MCAP merupakan alat transportasi (mobil) yang memiliki fasilitas layanan *telecenter*. *Telecenter* ini tidak terbatas secara geografis, letaknya dapat berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. MCAP merupakan fasilitas “layanan bergerak” untuk pemberdayaan masyarakat, dengan menyediakan akses informasi dan pengetahuan berbasis internet yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. MCAP memiliki kelengkapan komputer, telepon dan faksimili serta pencetak digital untuk meningkatkan minat belajar pemahaman teknologi informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi, ilmu, teknologi. MCAP menyediakan 4 unit komputer yang terakses ke internet, 2 buah faximile, 2 buah telepon dan juga tersedia sarana informasi berupa televisi.

Pengoperasian MCAP untuk memperluas konektivitas dan menembus keterisolasian masyarakat yang belum mendayagunakan TIK merupakan satu langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi. Pengoperasian MCAP diharapkan dapat menyiapkan kondisi komunitas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui TIK. Pengoperasian MCAP memiliki kendala yang diakibatkan ketidaktersediaan model pengoperasian MCAP. Model pengoperasian MCAP harus dapat diidentifikasi dengan tepat, sehingga kemudian MCAP yang diletakkan di suatu daerah dapat menemukan konteksnya dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat yang belum mendayagunakan TIK.

Berdasarkan data dari *webmonev* BAPPEDA DIY dapat diketahui sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan 58 sosialisasi teknologi informasi menggunakan MCAP. Untuk mengetahui jumlah operasional MCAP setiap tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Jumlah Sosialisasi Teknologi Informasi Menggunakan MCAP
Tahun 2009 – 2012

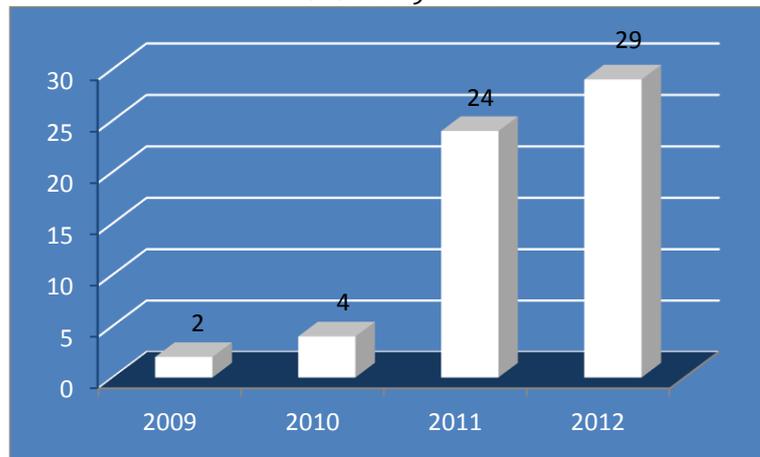


Sumber: WebMonev BAPPEDA DIY Tahun 2009 - 2012

- Media Elektronik

Sosialisasi dan diseminasi informasi publik dapat dilakukan melalui media elektronik baik itu radio maupun televisi. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 sudah dilakukan 59 kali sosialisasi dan diseminasi. Tema yang diangkat dalam sosialisasi dan diseminasi tersebut cukup beragam mulai dari produk hukum sampai isu – isu terhangat. Berikut grafik yang menggambarkan jumlah sosialisasi dan diseminasi menggunakan media elektronik.

Grafik 2.2
Jumlah Desiminasi Informasi Publik Menggunakan Media Elektronik
Tahun 2009 – 2012



Sumber: WebMoney BAPPEDA DIY Tahun 2009 - 2012

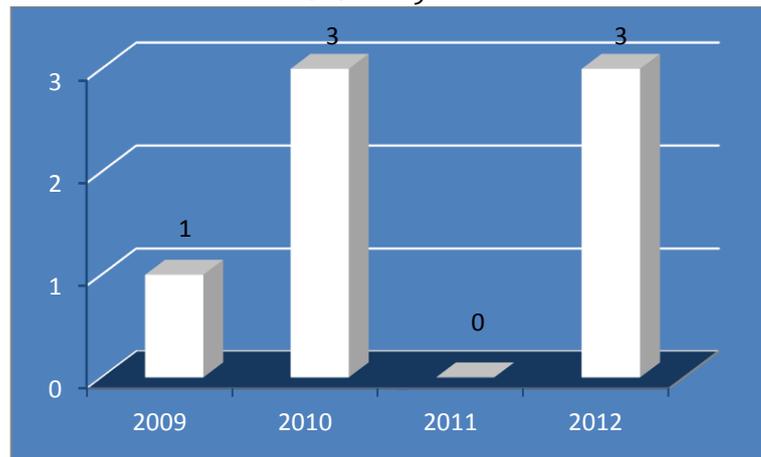
- Pertunjukan Rakyat (pertunra)

Media cetak dan elektronik yang dianggap lebih canggih dan lebih modern, ternyata tidak bisa menggantikan sepenuhnya keberadaan media tradisional yang lebih sederhana. Bahkan untuk menyampaikan nilai-nilai pesan luhur yang banyak terkandung dalam berbagai media tradisional seperti wayang kulit, kethoprak, tayub, dan sebagainya dari berbagai suku bangsa di negara ini, media modern tidak dapat mengungkapkan secara tuntas dan hanya bersifat dangkal.

Media tradisional sendiri dalam eksistensinya juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta banyak bekerjasama dengan media lainnya. Semua itu dilakukan agar keberadaannya tetap eksis di zaman sekarang dan tidak ditinggalkan oleh generasi penerus bangsa. Dengan kemunculan media komunikasi yang lebih modern tidak mematikan media tradisional. Bahkan media komunikasi modern bisa mendukung keberadaan media tradisional dan memberi warna media tradisional tersebut sehingga muncul media modern bernuansa tradisional, seperti TA TV, Jogja TV, dan Bali TV. Mulai tahun 2009 sampai tahun 2012 telah dilaksanakan 7 kali diseminasi informasi publik menggunakan media pertunra seperti pada grafik berikut.

Grafik 2.3

Jumlah Desiminasi Informasi Publik Menggunakan Pertunra
Tahun 2009 – 2012



Sumber: WebMonev BAPPEDA DIY Tahun 2009 - 2012

2) Forum Komunitas Masyarakat Informasi

Era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memilah dan memilih informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada kontra produktif dalam kerangka pembangunan di segala bidang. Forum komunitas masyarakat informasi memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut, karena sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah kehidupan masyarakat diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (*top down*) atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah (*bottom up*). Forum komunitas masyarakat informasi sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka.

Media cetak dan elektronik yang dianggap lebih canggih dan lebih modern, ternyata tidak bisa menggantikan sepenuhnya keberadaan media tradisional yang lebih sederhana. Bahkan untuk menyampaikan nilai-nilai pesan luhur yang

banyak terkandung dalam berbagai media tradisional seperti wayang kulit, kethoprak, tayub, dan sebagainya dari berbagai suku bangsa di negara ini, media modern tidak dapat mengungkapkan secara tuntas dan hanya bersifat dangkal. Namun di balik itu, media tradisional sendiri dalam eksistensinya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta banyak bekerjasama dengan media cetak lainnya.

Beberapa forum komunitas masyarakat di DIY antara lain Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA), Komunitas Jogja IT, dan lain-lain.

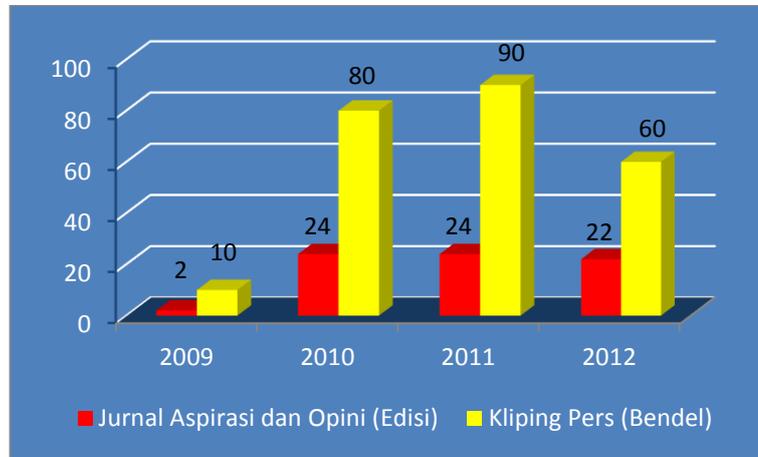
3) Penyerapan dan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik

Satu di antara karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah karakteristik partisipasi sebagaimana disebutkan dalam konsep penyelenggaraan *Good Governance* menurut PBB yang mencakup delapan karakteristik. Antara lain *equitable and inclusive, follows the rule of law, participatory, consensus oriented, responsive, effective and efficient, accountable, transparent*. Terbukanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan wujud dari demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hak masyarakat untuk berpartisipasi juga diatur dalam UUD 1945 secara eksplisit tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 yaitu : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Otonomi daerah dalam tataran peraturan perundang-undangan juga menempatkan partisipasi rakyat melalui aspirasi masyarakat sebagai satu dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam undang-undang untuk selanjutnya diatur dalam pasal Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Masyarakat atau publik itu sendiri berasal dari berbagai kalangan seperti masyarakat umum, akademisi, profesional dan praktisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dengan adanya partisipasi publik maka akan mendorong dua hal. Pertama, terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Ke dua, keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu. Partisipasi juga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk menyerap dan mengelola aspirasi dan opini masyarakat telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu penyusunan jurnal aspirasi dan opini, penyusunan kliping pers dan penyusunan ide warga. Mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 sudah tersusun 72 edisi jurnal aspirasi dan opini dan 240 bendel kliping pers. Jurnal aspirasi dan opini berisi materi hasil dari resume aspirasi masyarakat yang bersumber dari surat kabar lokal, nasional dan media elektronik. Hasil dari jurnal tersebut kemudian didistribusikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan kliping pers bermaterikan berbagai topik yang bersumber dari Media Massa. Grafik 2.4 menggambarkan kegiatan penyerapan dan pengelolaan aspirasi dan opini masyarakat tahun 2009 – 2012.

Grafik 2.4
Jumlah Penyusunan Kliping Pers, Jurnal Aspirasi dan Opini Publik
Tahun 2009 - 2012



Sumber: WebMonev BAPPEDA DIY Tahun 2009 - 2012

2.1.3. Pelayanan Informasi Terpadu

Plaza Informasi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Plaza Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi terpadu untuk memberikan kemudahan bagi berbagai kalangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang disediakan ditujukan bagi semua orang, baik yang memahami teknologi informasi maupun tidak. Masyarakat pengunjung Plaza Informasi dapat mengakses informasi melalui internet, layanan sms, call center, ataupun melalui faksimili. Materi konten Plaza Informasi dipasok oleh berbagai lembaga di tingkat lokal maupun nasional. Pengguna layanan informasi antara lain yaitu pelajar, mahasiswa dan peneliti,

masyarakat umum dan wartawan. Layanan yang disediakan oleh Plaza Informasi sebagai berikut:

1. Perpustakaan publikasi pemerintah

Menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan perundangan serta data instansional dalam berbagai bentuk, antara lain dokumentasi dan publikasi berupa rekaman TV, Radio, CD Interaktif serta materi berbentuk cetakan. Untuk kemudahan masyarakat dalam mendapatkannya, materi dibagi untuk tiap-tiap sektor dan diberi label sesuai dengan sumber instansinya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan layanan foto copy untuk mempermudah masyarakat mendapatkan salinan data. Plaza Informasi juga menyediakan layanan yang bersifat on-line, dimana masyarakat dapat mengakses informasi-informasi seputar kebijakan pemerintah melalui internet.

2. Pengadaan Pameran

- Pameran Bidang Umum.

Informasi dikemas dalam bentuk pameran dengan tema-tema tertentu sesuai dengan bidang-bidang terkait berupa informasi singkat cetakan yang bersumber dari instansi terkait, poster dan iklan layanan masyarakat, foto dan informasi peristiwa penting terkini, dan materi promosi daerah yang selalu diganti.

- Pameran Khusus.

Informasi dikemas dengan bentuk pameran terkait dengan event-event tertentu, seperti tentang pilkada, penerimaan siswa baru dan lain sebagainya.

- Pameran Promosi Daerah.

Informasi dikemas dengan bentuk pameran terkait dengan hasil kerajinan, agrobisnis, industri kecil dan lain sebagainya. Pameran ini untuk mempromosikan hasil produksi para pengrajin ataupun industri kecil.

3. Layanan Informasi On-line

Layanan ini memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi secara on-line berupa perpustakaan on-line, informasi pameran, beragam kegiatan, masalah-masalah umum lainnya serta kemudahan akses ke berbagai lembaga terkait (misal : website Pemerintah Daerah DIY, perguruan tinggi di DIY dan lain sebagainya). Juga tersedia warnet untuk pengunjung Plaza Informasi secara gratis.

4. Layanan *Call Center*

Memberikan berbagai informasi secara cepat dan mudah dengan dukungan database secara *on-line*. Dengan layanan ini, masyarakat akan mudah mendapatkan informasi terkait dengan isu-isu sosial, kebijakan-kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

5. Presentasi Massal

Selain layanan di atas, Plaza Informasi juga akan memberikan penjelasan-penjelasan umum terkait dengan masalah-masalah sosial, pengenalan sektor-sektor unggulan, seperti sektor pendidikan, pariwisata, budaya dan lain sebagainya, serta pengenalan tentang DIY secara umum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk forum untuk umum yang diselenggarakan di Aula Plaza Informasi.

6. Layanan Perpustakaan (fisik dan *on-line*)

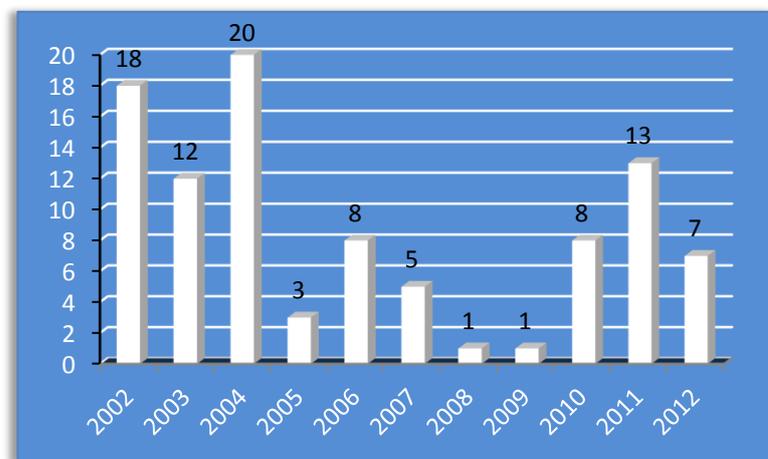
Memberikan berbagai informasi mengenai publikasi pemerintah. Dengan layanan ini masyarakat akan mudah mendapatkan informasi terbaru yang terkait dengan peraturan perundangan negara, peraturan perundangan daerah DIY, kebijakan daerah, dokumen dan publikasi kegiatan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota, informasi terpadu dan lain sebagainya.

2.1.4. Intranet dan Komunikasi Internal

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (intranet dan internet) di Pemerintah DIY telah dimulai sejak tahun 2002. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksiya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing Unit Kerja dapat berjalan semakin lancar. Intranet adalah Jaringan Komputer yang

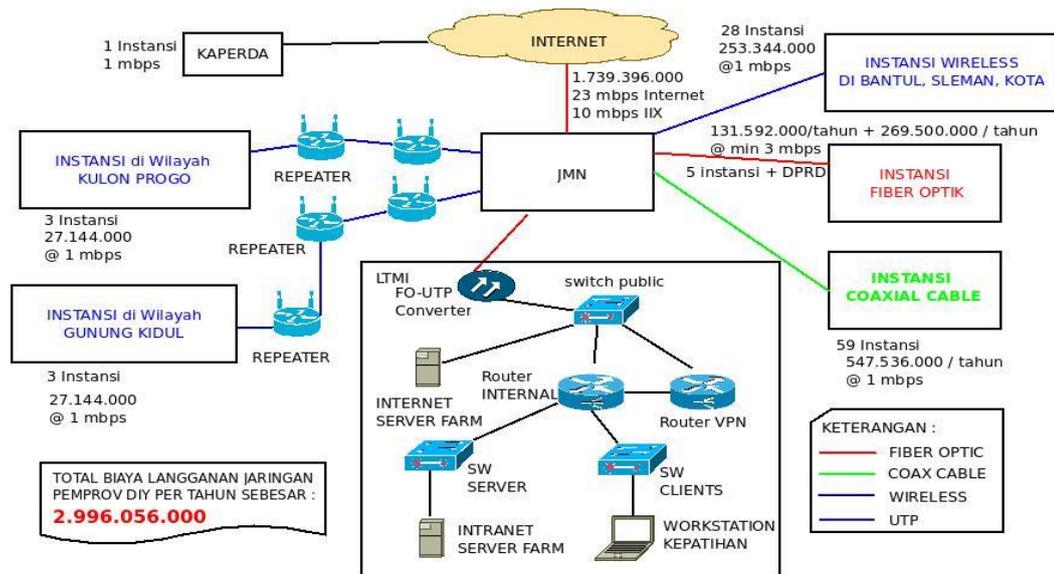
menghubungkan antar SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Internet adalah Jaringan yang menghubungkan komputer – komputer di lingkungan Pemerintah DIY dengan jaringan komputer di luar Pemerintah DIY. Mulai tahun 2002 sampai pada akhir tahun anggaran 2012 sudah tersambung 96 lokasi titik sambungan e-government di berbagai instansi di lingkungan pemerintah daerah DIY. Berikut grafik jumlah titik sambungan interkoneksi setiap tahun mulai tahun 2002 sampai tahun 2012.

Grafik 2.4
Jumlah Penambahan Titik Sambungan e-government
Tahun 2002 - 2012



Sumber: Bidang LTMI, Dishubkominfo, 2012

Pemerintah DIY saat ini hanya menyewa infrastruktur dari pihak ketiga dalam hal ini adalah Jogja Media Net (JMN). *Bandwidth* internet yang di sewa pemerintah DIY adalah sebesar 33 mbps digunakan lebih dari 90 titik lokasi sambungan yang terhubung di jaringan intranet Pemerintah DIY. *Bandwidth* intranet di masing – masing lokasi titik sambungan adalah sama sebesar 1 mbps. Media penghubung antar SKPD menggunakan 3 media, yaitu dengan Radio (*Wireless*), Kabel *Coaxial* dan kabel *Fiber Optic* tergantung jarak lokasi dan ketersediaan jaringan JMN. Berikut gambar peta jaringan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2012.



Gambar 2.3
Peta Jaringan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2012
Sumber: Bidang LTMI, Dishubkominfo, 2012

Untuk tabel instansi yang tersambung dengan jaringan berikut layanannya dapat dilihat pada lampiran

2.1.5. Sistem Informasi Manajemen

Sejak tahun 2004 telah disusun berbagai software SIM pelaksanaan DGS di Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain:

- Portal Pemerintah Daerah DIY
- CPNS Online (Penerimaan CPNS Secara Online)
- LPSE (Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik).
- Data dan Informasi Bencana.
- SIPKD
- SIMPEG
- SIMONEV
- SIM Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi DIY
- Aplikasi dan Konversi Data Sistem Kesamsatan

Selanjutnya dengan konsep e-gov tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam mendukung dan memberikan

partisipasi pada kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.

Dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian program aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) oleh seluruh instansi Pemerintah Daerah DIY diterbitkan SK Gubernur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Data base pendukung layanan e-Gov juga terus dikembangkan, seperti database Agricenter, pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, ATLAS Sumberdaya Wilayah serta *Multimedia Library*.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY Tahun 2009 – 2013, indikator capaian dan target untuk sektor komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Indikator Capaian dan Target Sektor Komunikasi dan Informatika
Tahun 2009 - 2013

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. Penyediaan Pelayanan dari <i>Government Centris</i> menuju <i>Citizen Centris</i>	Persen	2	5	10	15	20
2. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan	Persen	5	10	15	20	25
3. Penambahan Layanan Data Center DGS	Persen	5	5	5	4	4

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2009 – 2013

Realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja sektor komunikasi dan informatika pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sektor Komunikasi dan Informatika
Tahun 2012

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Penyediaan Pelayanan dari Government Centris ke Citizen Centris	%	15	23	153
Persentase Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital Terhadap Data dan Informasi Keseluruhan	%	20	58,35	292
Persentase penambahan layanan data center DGS	%	4	2,75	69

Sumber: e-Sakip WebMonev Bappeda DIY

Secara umum seluruh target yang direncanakan pada tahun 2012 telah memenuhi capaian kecuali untuk penambahan layanan data center DGS. Upaya pencapaian indikator kinerja sektor komunikasi dan informatika pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Pelayanan dari Government Centris ke Citizen Centris

Target persentase penyediaan pelayanan dari *Government Centris* ke *Citizen Centris* dihitung berdasarkan persentase dari jumlah layanan *citizen centris* yang seharusnya disediakan. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja penyediaan pelayanan dari *government centris* ke *citizen centris* dilakukan dengan perubahan orientasi *website* atau portal Pemerintah Daerah DIY dengan cara *up date* atau penambahan konten portal dari *Government Centris* menuju *Citizen Centris* dan layanan *SMS Gateway*. Sampai pada akhir RPJMD DIY 2009 – 2013 ditargetkan untuk update dan penambahan konten portal *Government Centris* menuju *Citizen Centris* sebanyak 5 konten, sedangkan untuk layanan *SMS Gateway* yaitu 300 SMS.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut antara lain pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi, pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan informasi dan peningkatan kualitas SDM teknologi informasi.

2. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi Keseluruhan

Ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan pada tahun 2012 mempunyai target 20%, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 58.35%. Upaya yang dilakukan untuk realisasi capaian indikator tersebut yaitu menyediakan konten perpustakaan dalam bentuk digital. Selain itu, juga menyediakan data dan informasi yang harus tersedia dari 34 SKPD di Pemerintah Daerah DIY. Kegiatan untuk mendukung ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan antara lain perencanaan dan pengembangan kebijakan dan informasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi, penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Persentase Penambahan Layanan Data Center DGS

Paramater yang digunakan untuk mengukur penambahan layanan data center DGS meliputi :

- a. Penambahan layanan data center unggulan DGS
- b. Penambahan layanan data center pendukung DGS
- c. Semua SKPD dan UPTD terhubung jaringan interkoneksi Pemprov DIY
- d. Diseminasi informasi di website Pemda DIY
- e. Up date data website
- f. Penambahan konten
- g. Pelatihan SDM TI

2.3. Permasalahan Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika

Beberapa masalah yang dijumpai dalam pembangunan di sektor komunikasi dan informatika dapat diuraikan pada bagian berikut ini.

- a) Belum ada GCIO (*Government Chief Information Officer*) yang bertugas untuk mengkoordinasikan kebutuhan dan sumberdaya informasi di lingkungan Pemda DIY.
 - Kebutuhan data dan informasi yang akurat, cepat, komprehensif, dan reliabel, untuk pembuatan keputusan baik oleh pimpinan maupun oleh para pelaksana, sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Saat ini data yang ada masih sangat bervariasi, misalnya data jumlah penduduk berbeda-beda, tergantung instansi yang mengelolanya. Informasi yang disediakan oleh BPS, BKKBN, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk pembuatan keputusan akan menyebabkan distorsi yang cukup lebar.
 - Sumber data terdiri dari berbagai SKPD dan instansi terkait lainnya. Data yang dihasilkan perlu dipadukan ke dalam sebuah laporan yang siap digunakan oleh pengambil kebijakan untuk membuat keputusan. Untuk itu antar satuan kerja harus melakukan konsolidasi validitas dan reliabilitas masing-masing data yang dimilikinya. Sebisa mungkin, sumber data ada di satu instansi saja, sedang instansi lain hanya bersifat sebagai pelengkap. Sebagai contoh, data induk kependudukan ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena pengelolaan Kartu Keluarga dan KTP ada di sana. Sedangkan untuk pengelompokan keluarga ke dalam kelompok prasejahtera dan sejahtera dilakukan oleh Dinas Sosial. Pengelompokan penduduk berdasarkan aktivitas Keluarga Berencana, dilakukan oleh BKKBN. Penanganan layanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, baik melalui pencatatan di masing-masing Puskesmas, maupun di rumah-rumah sakit daerah.
 - Demikian pula dengan data lainnya yang ada di masing-masing instansi atau satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, sebaiknya

disinkronisasi agar dapat memberikan informasi yang baik kepada para pembuat keputusan.

- Untuk keperluan koordinasi data dan informasi, bahkan juga penyelarasan proses bisnis antar satuan kerja dan instansi Pemerintah lainnya, diperlukan seorang pejabat yang berperan sebagai koordinator. Dalam *best practice* yang selama ini berlaku, pejabat ini disebut dengan *Chief Information Officer* dan disingkat CIO. Karena berada dalam lingkungan Pemerintahan, secara khusus pejabat ini diberi sebutan *Government CIO*. Tanggung jawab utama seorang CIO adalah menyelaraskan potensi sistem informasi (SI) / teknologi informasi (TI) yang ada di dalam sebuah entitas agar dapat mendukung tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau entitasnya (Ward dan Peppard, 2003).
- b) Belum ada dukungan SI/TI untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah DIY, karena saat ini masih sangat tergantung pada masing-masing satuan kerja untuk menyusun rencana kerja pembangunan. Seharusnya ada suatu mekanisme untuk merancang usulan awal yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang.
- Pimpinan Daerah dapat menentukan arah pembangunan periode mendatang, dengan menekankan pada masing-masing sektor pilihan.
 - Masing-masing satuan kerja juga memiliki usulan yang kemudian diselaraskan, sehingga dapat mengarah pada pembangunan yang terpadu, karena masing-masing satuan kerja memiliki arah yang sama.
- c) Belum ada layanan kantor digital (*e-office*), sehingga kebutuhan untuk menyiapkan informasi melalui berbagai dokumen masih menemukan kesulitan.
- Belum adanya manajemen dokumen, data dan file secara terpadu dan bersama-sama, sehingga masih terjadi kesulitan dalam pengelolaan dokumen kearsipan, pemborosan sumber daya, terutama koneksi internet dan kapasitas penyimpanan (*harddisk*), dan lambatnya penyiapan informasi strategis untuk pembuatan keputusan.

- Kebutuhan data dan informasi untuk pembuatan keputusan oleh para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY masih belum dapat dipenuhi secara terpadu oleh berbagai SI/TI yang ada. Salah satu sebabnya adalah masih tersebarunya berbagai dokumen dan data di berbagai SKPD. Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem *e-Office* memungkinkan adanya pertukaran data dan informasi di antara para staf SKPD dengan cara yang mudah, murah, dan aman.
- d) Belum terpadunya ketersediaan data yang diperlukan untuk pembuatan keputusan strategis para pimpinan daerah dan pengelola SKPD.
- Masih terdapat duplikasi dan redundansi data yang berasal dari beberapa instansi, misalnya jumlah penduduk pra-sejahtera yang dapat berasal dari BPS, Dinas Sosial, BKKBN. Karena kriteria di masing-masing satuan kerja berbeda, maka jumlah penduduk pra-sejahtera ini juga tidak sama, sehingga sulit untuk digunakan sebagai dasar pembuat keputusan oleh para pengambil kebijakan.
 - Belum ada sebuah aplikasi *dashboard* yang dapat menampilkan berbagai data dari berbagai sumber untuk dapat disandingkan. Seandainya data belum dapat disinkronkan, paling tidak, data dapat ditampilkan secara berdampingan dan ditampilkan juga berbagai sumber data tersebut. Untuk sementara, para pembaca (baik para pimpinan atau pembuat keputusan lainnya), dipersilakan memilih sendiri data yang diperlukan.
- e) Tenaga TI yang ada saat ini sangat tidak mencukupi untuk menangani penyelenggaraan TI di Pemda DIY, yang sudah mencapai 93 titik jaringan dan empat layer aplikasi, yaitu jaringan, sistem operasi, aplikasi, dan konten.
- Saat ini sudah ada lebih dari 30-an satuan kerja atau instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Masing-masing instansi memiliki arus data dan informasi yang khas sesuai dengan proses bisnis di dalamnya. Sistem informasi dan teknologi informasi yang ada di dalam masing-

masing entitas tersebut terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah terhitung kompleks, karena meliputi banyak jaringan dengan banyak server dan ribuan komputer PC (belum termasuk *mobile device* seperti tablet PC dan telepon seluler).

- Dengan konfigurasi yang sedemikian besar, relatif mudah terjadi gangguan baik di perangkat keras, perangkat lunak, maupun pada jalur komunikasi di antara berbagai entitas. Apalagi sebagian besar perangkat komputer yang ada di lingkungan Pemda DIY sudah berumur lebih dari 3-5 tahun. Oleh karenanya diperlukan tenaga-tenaga andal di masing-masing satker untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan perangkat dan jaringan SI/TI.
- Selama ini baru ada 4 orang teknisi dengan dibantu 7 orang karyawan Jogja Media Net sebagai supplier koneksi Internet untuk Pemda DIY. Dari satu sisi, karyawan dari supplier dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perangkat keras, baik komputer maupun perangkat jaringan. Sedangkan karyawan atau teknisi Pemda, selain mengatasi masalah perangkat keras, juga harus mengatasi masalah perangkat lunak.
- Selama ini, masalah yang timbul terdiri atas masalah-masalah kecil, misalnya terjadi perubahan *setting* karena adanya sistem baru, perangkat baru, dan teknologi baru lainnya. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan cepat, namun tetap memerlukan waktu, apabila terjadi di beberapa unit sekaligus. Untuk masalah-masalah yang berat, terutama kerusakan, memerlukan waktu lama (bisa berhari-hari), sehingga harus dibawa ke bengkel servis.
- Untuk memperkecil terganggunya proses bisnis di masing-masing satuan kerja, diperlukan adanya tenaga-tenaga khusus di masing-masing satuan kerja yang dapat mengatasi masalah-masalah rutin sehari-hari. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang berat, diperlukan tenaga-tenaga terampil di Dishubkominfo yang dapat membantu satuan-satuan kerja lainnya.

- Untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil ini, diperlukan latihan secara rutin, paling tidak setiap tahun, untuk mengikuti berbagai perkembangan di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan.
- f) Perlindungan terhadap infrastruktur jaringan komunikasi dan aplikasi TI di lingkungan Pemda DIY masih belum cukup kuat, sehingga keamanan sistem masih lemah.
- Salah satu titik lemah jaringan di Pemda DIY adalah penyediaan layanan jaringan *wi-fi* namun tanpa dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat. Jaringan *wi-fi* ini terhubung langsung ke sistem jaringan intranet, sehingga apabila ada serangan terhadap jaringan *wi-fi*, dapat langsung mengenai jaringan intranet yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas internal.
 - Belum dipisahkan antara kebutuhan Internet dan Intranet. Internet lebih ditujukan untuk memberi layanan kepada masyarakat dan pihak luar lainnya, sedangkan Intranet ditujukan untuk kebutuhan internal. Beberapa instansi/SKPD menyediakan layanan *wifi/hotspot* untuk masyarakat tanpa dipisahkan dari layanan Intranet. Hal ini menimbulkan ancaman dan risiko yang sangat besar, karena jaringan *wifi* relatif mudah dibajak oleh para peretas (*hacker*).
 - Penggunaan jalur komunikasi sering dilakukan oleh dua kebutuhan yang sama atau lebih, misalnya pencarian dan pengunduhan suatu *file*, yang sama-sama menggunakan sebuah situs (misalnya update suatu aplikasi, update antivirus). Hal ini mengakibatkan jalur Internet menjadi lambat dan sulit digunakan untuk keperluan-keperluan penting yang lebih mendesak.
 - Belum ada pemeliharaan yang dilakukan secara berkala terhadap perangkat keras dan perangkat lunak, untuk menjamin kinerja komputer, aplikasi dan jaringannya agar tetap prima. Sebagai contoh, belum ada

pelaksanaan proses defragmentasi yang rutin terhadap *harddisk* di masing-masing komputer.

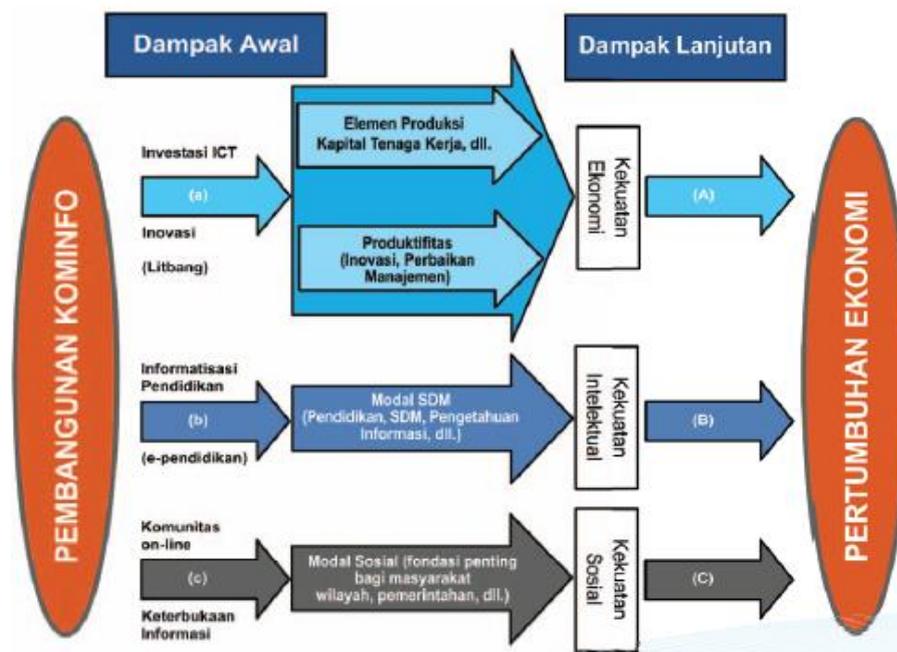
- g) Perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan SI/TI harus semakin ditingkatkan, karena semakin banyak penipuan yang dilakukan dengan berbagai sarana SI/TI, misalnya SMS tentang pengiriman uang, SMS tentang penawaran barang elektronik dengan harga sangat murah, hingga kejahatan yang mengancam pelajar atau remaja.

III. KEBIJAKAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tema pembangunan DIY pada tahun 2014 adalah: "Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera". Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang (tidak mudah terombang ambing) akibat perubahan global dan perubahan nasional. Pembangunan di sektor komunikasi dan informatika seharusnya dapat menghasilkan efek berantai ke meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Meskipun angka korelasi ini berbeda setiap negara akan tetapi pemahaman bahwa pembangunan TIK secara positif dan pasti akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perlu diyakini agar kita tidak ragu dan terus kontinyu untuk melanjutkan pembangunan ini. Gambar 3.1 memperlihatkan efek berantai yang memperlihatkan dampak pembangunan ini. Dampak pertama yang bisa dilihat adalah sisi (a) infrastruktur; (b) peningkatan keterampilan; dan (c) peningkatan penggunaan berbagai aplikasi TIK dalam kehidupan.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Komunikasi dan Informatika terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Japan ICT Whitepaper 2009

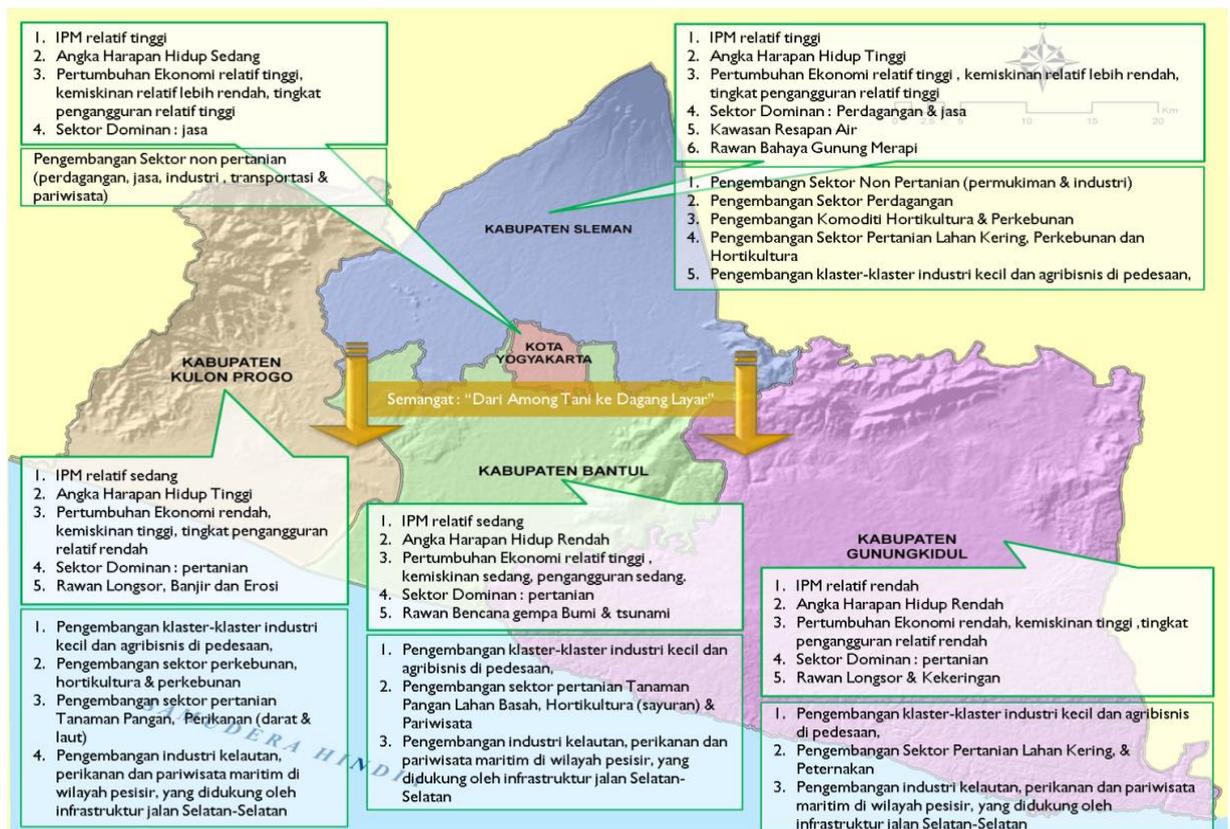
Pembangunan dan penguatan infrastruktur dalam implementasinya memerlukan investasi yang tinggi dan hasil inovasi agar sesuai peruntukannya. Hal tersebut membawa kepada terjadinya peningkatan skala elemen produksi, kebutuhan tenaga kerja serta membaiknya produktifitas sejalan dengan menguatnya infrastruktur. Bergeraknya elemen produksi dan produktifitas secara positif akan membangun kekuatan ekonomi sebagai dampak kedua. Dengan alur yang sama, peningkatan ketrampilan SDM dibidang TIK akan membawa kepada terbangunnya kekuatan intelektual, sedangkan peningkatan berbagai aplikasi TIK dalam kehidupan baik dalam komunitas *online* maupun dalam kerangka keterbukaan informasi membawa kepada terbangunnya kekuatan sosial. Tiga kekuatan ini merupakan modal dasar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan (Buku Putih Kominfo 2010).

Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera dimaknai sebagai upaya mengarahkan kepada perwujudan visi jangka menengah daerah Tahun 2013-2017. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Sektor komunikasi dan informatika dengan inovasi teknologinya mempunyai peran strategis di dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Melalui program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa akan mendukung mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih maju, mandiri dan sejahtera dengan membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat sehingga meningkatkan daya saing dengan menghilangkan keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Peran sektor komunikasi dan informatika dalam tema pembangunan DIY pada tahun 2014 yaitu berkontribusi terhadap prioritas pembangunan DIY dengan reformasi birokrasi dan tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola ini ditetapkan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Rencana pembangunan tahun 2014 juga menggunakan pendekatan kewilayahan yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya. Berikut merupakan gambaran kondisi per-wilayah Kabupaten-Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta potensi pengembangannya.

Gambar 3.2
Arah Pembangunan Kewilayahan DIY



Sumber: RKPD Tahun 2014

3.2. Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika

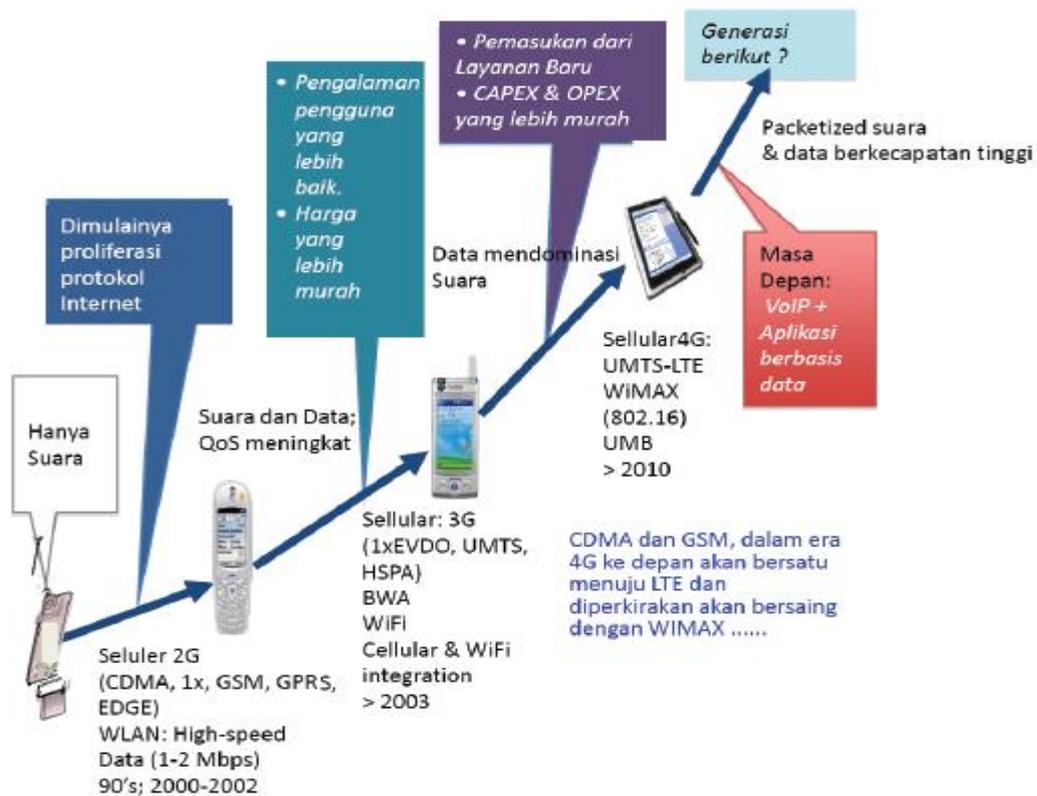
Analisa kebijakan dan sasaran pembangunan sektor komunikasi dan informatika dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang memunculkan hal-hal baru. Berbagai perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Beberapa perkembangan teknologi yang perlu segera dipertimbangkan di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Jalur Pita Lebar.

Jalur pita lebar dalam teknologi komunikasi dan informasi, yang memungkinkan data dalam berbagai bentuk (suara, gambar, video) dapat saling dikirim dan diterima dari dan ke berbagai perangkat dengan mudah. Jalur LTE atau 4G sudah siap dioperasikan oleh berbagai operator komunikasi di Indonesia.

Gambar 3.3
Perkembangan Pita Lebar



Sumber: Buku Putih Kominfo 2010

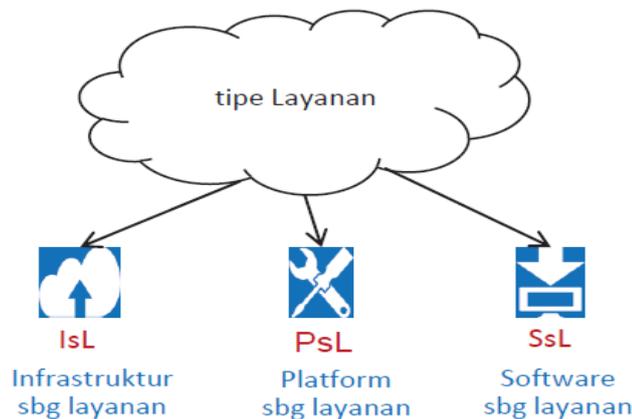
2. Komputasi Awan.

Teknologi jalur pita lebar akan membawa dampak pada bidang lainnya, misalnya adalah adanya aplikasi dan basis data. Aplikasi sekarang sudah banyak yang disediakan di internet, sehingga tidak harus di instal dan dijalankan di

komputer lokal. Hal ini tentu akan memudahkan pengguna, karena tidak perlu harus secara rutin menginstal dan memperbarui aplikasinya, namun tetap dapat memperoleh manfaat dari aplikasi tersebut. Komputasi awan dapat memberi hasil yang sama untuk setiap user, meskipun dari tempat yang berbeda-beda.

Komputasi awan tidak memerlukan perangkat yang mahal untuk dapat dinikmati para penggunanya. Namun untuk penyelenggaraannya memang diperlukan teknologi tinggi, karena meliputi jaringan komunikasi cepat, teknologi basis data yang besar dan handal, serta tingkat keamanan yang tinggi. Apabila Pemerintah Daerah DIY belum memiliki tenaga yang cukup, dapat menggunakan layanan pihak vendor terlebih dahulu.

Gambar 3.4
Jenis Layanan Komputasi Awan



Sumber: Buku Putih Kominfo 2010

Layanan komputasi awan tersedia dalam tiga bentuk, yaitu komputasi awan dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk *platform*, dan dalam bentuk program aplikasi. Pemanfaatannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Untuk tahap awal, dapat dipilih dulu komputasi awan dalam bentuk program aplikasi, karena tinggal memakai. Layanan seperti ini misalnya saja adalah layanan *e-mail* atau layanan *e-office*. Pemakai tinggal menggunakan aplikasi melalui jalur komunikasi yang tersedia.

Namun pada jangka panjang, setelah kebutuhan aplikasi dan pengelolaan basis data meningkat, maka komputasi awan juga harus semakin menjadi andalan,

apakah sebagai *platform* layanan, atau sebagai *infrastruktur* layanan. Untuk itu memang perlu dipersiapkan tenaga-tenaga TIK yang memenuhi kualifikasi tertentu, tidak hanya dalam bidang teknis perangkat keras, namun juga dalam bidang perangkat lunak dan pengelolaan basis data.

3. Komputasi Hijau.

Perkembangan teknologi seringkali membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Perangkat komputer yang sudah usang dan tidak dipakai, mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan, misalnya adalah zat merkuri dan besi yang menimbulkan korosi. Pembuangan barang-barang bekas teknologi komputer ini perlu mulai dipikirkan sejak sekarang, karena semakin banyak perangkat yang sudah usang dan tidak dapat diperbaiki atau dipakai lagi.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika

Visi RPJMD DIY 2012 – 2017 adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 4 misi pembangunan yaitu:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Untuk mewujudkan misi ketiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan strategi meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. Strategi tersebut dapat didukung dari urusan komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik secara optimal (e-Gov).

Indikator pematapan dan pengembangan penerapan e-Gov di Pemda DIY dalam 5 tahun kedepan adalah:

1. Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan;

Dilakukan dengan optimalisasi pendampingan TiMPLI sebagai tim yang mengawal DGS.

2. Penguatan jaringan IT di Pemda DIY, dengan strategi:

- a. pemantauan dan penataan ulang untuk optimalisasi pengembangan infrastruktur sehingga infrastruktur jaringan IT terintegrasi;
- b. Pembuatan SOP Telematika (Infrastruktur dan Sistem Informasi Manajemen)
- c. Perlu melegalkan perangkat lunak sistem operasi yang digunakan dan mengganti sistem Aplikasi Perkantoran dengan menggunakan *Open-Office* yang *free* dan *Open Source*;

3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat;

Strategi yang perlu dilakukan:

- a. *Data Dictionary* bertujuan untuk kejelasan mengenai kepemilikan data, kewajiban pembaharuan data (*updating data*) dan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak terjadi duplikasi data karena setiap SKPD mempunyai data sendiri yang langsung diinformasikan melalui web. Data dikelola oleh instansi tetapi dalam satu koordinasi terpusat. Hal tersebut telah diinisiasi dengan kegiatan Satu Data Pembangunan.
- b. Pengelolaan sistem dan informasi yaitu terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengintegrasikan data dasar sehingga data dan berkas dapat dikelola secara digital sehingga penyebaran informasi pembangunan bagi masyarakat dapat efektif. Peningkatan SDM dengan pelatihan pengelolaan berkas dan penyimpanannya secara digital, termasuk pembakuan komunikasi antar aplikasi;
- c. Analisa efektivitas kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi.

4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT.

IV. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp22,129 trilyun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,16% dari tahun sebelumnya, sedangkan proyeksi PDRB tahun 2012 diperkirakan masing-masing mencapai kisaran Rp22,238 trilyun - Rp23,362 trilyun. PDRB DIY diprediksikan mengalami kenaikan terus menerus sampai tahun 2014 dengan kisaran proyeksi PRDB pada 2013 dan 2014 adalah Rp24,444 trilyun-Rp24,600 trilyun dan Rp25,740 trilyun-Rp25,978 trilyun. Sementara itu prediksinya pada tahun 2015 berkisar antara Rp27,130 trilyun sampai Rp27,459 trilyun.

Selama tahun 2011, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari PDRB.

Tabel 4.1.
Kontribusi PDRB Sektoral Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000), 2011 – 2015 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012*	2013*	2014*	2015*
1. Pertanian	17,00	16,23	16,04	15,82	15,54
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,68	0,65	0,63	0,62
3. Industri Pengolahan	13,31	13,34	13,37	13,37	13,32
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,92	0,91	0,91	0,91
5. Konstruksi	9,75	9,86	9,90	10,02	10,10
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,82	21,02	21,08	21,15	21,35
7. Transportasi dan Komunikasi	10,70	10,87	10,99	11,02	11,02
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,80	9,91	10,01	10,05	10,07
9. Jasa-jasa	17,07	17,17	17,06	17,05	17,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2011 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2015 mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Pertumbuhan sektor pertanian yang lambat harus menjadi salah satu fokus perhatian khusus di DIY mengingat pangsa tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut masih sangat besar. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini

dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian.

Secara makro regional kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi sebagai penopang perekonomian makro DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

4.2. Pendanaan Pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika

Alokasi besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Pagu APBD DIY Tahun 2012 – 2013 untuk Sektor Komunikasi dan Informatika

Program/Kegiatan	Pagu 2012 (Rp)	Pagu 2013 (Rp)	Selisih	%
1	2	3	4 (3-2)	5
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,311,653,220	8,496,545,100	6,184,891,880	267.55
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	96,378,720	119,469,400	23,090,680	23.96
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	375,800,000	555,770,000	179,970,000	47.89
Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	97,218,000	39,207,000	(58,011,000)	(59.67)
Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	190,000,000	144,296,000	(45,704,000)	(24.05)
Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Informasi*	22,120,000		(22,120,000)	(100.00)
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	280,778,000	206,200,000	(74,578,000)	(26.56)
Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Pengembangan Layanan Informasi	109,726,100	53,669,500	(56,056,600)	(51.09)

Program/Kegiatan	Pagu 2012 (Rp)	Pagu 2013 (Rp)	Selisih	%
Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta	1,139,632,400	6,971,485,600	5,831,853,200	511.73
Layanan Pengadaan Secara Elektronik		311,489,600	311,489,600	
Diseminasi Informasi Dalam Informasi Nasional		94,958,000	94,958,000	
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	200,553,000	327,264,000	126,711,000	63.18
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	89,308,000	199,119,000	109,811,000	122.96
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	111,245,000	128,145,000	16,900,000	15.19
Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi	44,918,000	31,971,600	(12,946,400)	(28.82)
Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan	28,925,000	23,576,000	(5,349,000)	(18.49)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi	15,993,000	8,395,600	(7,597,400)	(47.50)
	2,557,124,220	8,855,780,700	6,298,656,480	246.32

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2013 terjadi kenaikan pagu APBD DIY untuk sektor komunikasi dan informatika sebesar Rp. 6,298,656,480 atau sebesar 246.32% dibanding pada tahun anggaran 2012. Jika dilihat dari postur pendanaan setiap program, maka Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa merupakan program yang menggunakan pagu anggaran terbesar yaitu lebih dari 90% dari total anggaran sektor komunikasi dan informatika. Pada tahun anggaran 2013, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terjadi kenaikan yang paling tinggi yaitu sebesar 267,55% atau sebesar Rp. 6,184,891,880. Jika dilihat dari kedalaman kegiatan pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, maka kegiatan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan kegiatan yang menggunakan pagu anggaran yang terbesar. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan sektor komunikasi dan informatika kedepan

yaitu pengembangan infrastruktur jaringan komputer e-Gov di Pemerintah Daerah DIY.

LAMPIRAN

Daftar Instansi Pemerintah Daerah DIY yang Tersambung Jaringan

No	Nomor ID JMN	Nama	Alamat	Layanan
1	JMN000282	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jl. Tentara Pelajar No. 15	VPN 1024
2	JMN000283	Dinas PUP-ESDM	Jl. Bumijo No. 5	VPN 1536
3	JMN000284	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Tentara R Mataram No. 53	VPN 1024
4	JMN000286	Dinas Pendidikan	Jl. Cendana No. 9	VPN 1024
5	JMN000287	Kantor Inspektorat	Jl. Cendana No. 40	VPN 1024
6	JMN000288	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP)	Jl. Kusumanegara No. 11	VPN 1024
7	JMN000289	Dinas Sosial	Jl. Janti	VPN 1024
8	JMN000290	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Jl. Argo Lumbang No. 19	VPN 1024
9	JMN000291	Dinas Perikanan dan Kelautan	Jl. Sagan III No. 4, Sagan	VPN 1024
10	JMN000292	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah [Bapusda]	Jl. Tentara Mataram No. 4	VPN 1024
11	JMN000293	Dinas Kebudayaan	Jl. Cendana No. 11	CORP/VPN1536
12	JMN000294	Dinas Pariwisata Daerah DIY	Jl. Malioboro No. 56	VPN 1024
13	JMN000295	Dinas Kesehatan	Jl. Tompeyan No. 201	VPN 1024
14	JMN000297	Dinas Perhubungan	Jl. Babarsari No. 30	VPN 1024
15	JMN000301	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Lingkar Utara	W-VPN1024
18	JMN000363	Jogja Study Center [Bapusda DIY]	Jl. Faridan M. Noto No. 21 Yogyakarta	VPN 1024
19	JMN000445	Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura (PTPH)	Jl. Gondosuli No 2A	VPN 1024
20	JMN000505	Dinas PUP-ESDM Bidang Pengairan	Jl. Solo km. 6	VPN 1024
21	JMN000506	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Kyai Mojo No. 56	VPN 1024
22	JMN000507	Kantor Sekretariat KPU	Jl. Aipda Tut Harsono (utara DPRD dkt Janabadra)	VPN 1024
23	JMN000508	Dinas PUP-ESDM Bidang Bina Marga	Jl. Gowongan Kidul	VPN 1024
24	JMN000509	Kantor Badan Diklat DIY -	Gunung Sempu Bantul	VPN 2048
25	JMN000510	Rumah Sakit Jiwa DIY [RS Gracia]-	Pakem Sleman	W-VPN1024
26	JMN000511	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Bidang Koperasi	Jl. Kusumanegara No. 9	VPN 1024
27	JMN000512	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah (Bapusda)	Jl. Malioboro No. 175	VPN 1024
28	JMN000525	Kantor Museum Sono Budoyo - (DISBUD)	Jl. Trikora No. 6	VPN 1024
29	JMN000526	Kantor Taman Budaya - (DISBUD)	Jl. Sriwedani No. 1	VPN 1024
30	JMN000627	Dinas Pertanian DIY	Jl. Gondosuli No 2A	VPN 1024
31	JMN001039	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kab. Bantul	Jl. Badegan No. 25	W-VPN1024
32	JMN001040	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kab. Gunung Kidul	Jl. Gunung Kidul	W-VPN1024
33	JMN001041	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kab. Kulon Progo	Jl. Bhayangkara Kulonprogo	W-VPN1024
34	JMN001042	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kab.	Sleman	W-VPN1024

No	Nomor ID JMN	Nama	Alamat	Layanan
		Sleman - (Samsat Sleman)		
35	JMN001043	UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Jl. Kaliurang, Pakem	W-VPN1024
36	JMN001044	Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSBTPH)	Jl. Gondosuli No 6	VPN 1024
37	JMN001045	Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jl. Gedong kuning	VPN 1024
38	JMN001046	Balai Latihan Pendidikan Teknis [BLPT]	Jl. Kyai Mojo No. 60	VPN 1024
39	JMN001047	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wil. Sungai progo, Opak dan Oyo	Jl. Solo km 6.5	VPN 1024
40	JMN001048	Balai Latihan Kerja	Jl. Kyai Mojo No. 5	VPN 1024
41	JMN001049	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah (Bapusda)	Jl. Tentara R Mataram No. 1	VPN 1024
42	JMN001050	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat [BPPM] - DIY	Jl. Tentara R Mataram	VPN 1024
43	JMN001058	Balai Teknologi Komunikasi dan Pendidikan	Jl. Kenari No. 2	VPN 1024
44	JMN001072	Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru	Jl. DI Panjaitan Yogyakarta	VPN 1024
45	JMN001101	Balai Laboratorium Kesehatan	Jl. Ngadinegaran	VPN 1024
46	JMN001102	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP)	Jl. Bantul km. 4 Jaranan Panggungharjo Sewon Bantul	W-VPN1024
47	JMN001106	Balai Hiperkes dan Keselamatan kerja DIY	Jl. Ireda No. 38 Keparakan	VPN1024
48	JMN001770	Balai Pengembangan Bisnis & Kerajinan- (Disperindagkop)	Jl. HOS Cokroaminoto No. 162	VPN 1024
51	JMN001816	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah (Bapusda)	Jl. Tentara R Mataram No. 29	VPN-3072
52	JMN002375	Balai Pengembangan Mutu Bibit dan Pakan Ternak	Sumedang Purwobinangun Pakem	W-VPN1024
53	JMN002376	Balai Pelatihan Kesehatan	Jl. Solo km. 12.8 Kalasan	W-VPN1024
54	JMN002377	Dinas Perindagkop - (Disperindagkop)	Jl. HOS Cokroaminoto No. 162	VPN 1024
55	JMN002393	Balai Metrologi Disperindagkop	Jl. Sisingamangaraja No. 21	VPN 1024
56	JMN002427	Disperindagkop	Jl. AM. Sangaji No. 41	VPN1024
58	JMN002900	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Jl. Jend. Sudirman No. 5	VPN 1024
59	JMN002902	Balai Pemuda dan Olahraga	Alun Alun Selatan Yogyakarta	VPN 1024
61	JMN003117	KPDE Bantul	Komplek Pemda Bantul	W-VPN1024
62	JMN003118	KPDE Kulon Progo	Komplek Pemda Kulon Progo	W-VPN1024
63	JMN003200	BPIPBPJK PUP - ESDM DIY	Jl. Ringroad Timur Maguwoharjo	W-VPN1024
64	JMN003411	Balai Diagnosa Kehewan	Sumberagung Jetis	W-VPN1024

No	Nomor ID JMN	Nama	Alamat	Layanan
			Bantul	
65	JMN003563	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah (Bapusda)	Jl. Tentara R Mataram No. 4	VPN 1024
68	JMN003927	UPTD Pertanian Kulon Progo	Nanggulan Wijilan Wijimulyo	W-VPN1024
69	JMN004088	Dinas Kebudayaan Taman Budaya	Jl. Cendana No. 11	PROF-INT/VPN
70	JMN004115	Gerai Investasi	Jl. Brigjend Katamso (Eks Gedung BID) Lt. 2	VPN 1024
72	JMN004241	Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP)	Argomulyo Cangkringan Sleman	W-VPN1024
73	JMN004242	Balai Pelatihan Kesehatan	Jl. Saronodipoyo Godean	W-VPN1024
74	JMN004243	Balai Pengobatan Paru-Paru (BP4)	Jl. Senopati Palbapang Bantul	W-VPN1024
75	JMN004244	Panti Sosial Tresna Wreda	Duwetsari Pakembinangun	W-VPN1024
76	JMN004245	Panti Sosial Pamardi Putro	Karangmejo Purwomartani Ngemplak	W-VPN1024
78	JMN004320	Pusat Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Kesbanglinmas	Jl. Kenari Miliran	VPN1024
79	JMN004362	Dinas Perhubungan - (CCTV)	Pertigaan Maguwo	VPN 1024
80	JMN004363	Dinas Perhubungan - (CCTV)	Perempatan Tugu	VPN 1024
81	JMN004364	Dinas Perhubungan - (CCTV)	Perempatan Jombor - Jl. Magelang km. 5	W-VPN1024
82	JMN004365	Dinas Perhubungan - (CCTV)	Perempatan Mirota Kampus	VPN 1024
83	JMN004366	Dinas Perhubungan - (CCTV)	Perempatan Kampus UIN - Jl. Solo	VPN 1024
84	JMN004529	Panti Sosial Asuhan Anak	Banjarharjo Bimomartani Ngemplak	W-VPN1024
85	JMN004530	Panti Sosial Bina Netra	Jl. Parangtritis km. 5 Sewon	W-VPN1024
86	JMN004570	Dinas Perhubungan	Jl. Babarsari No. 30	VPN 1024
87	JMN004575	Balai KPH Yogyakarta	Jl. Argo Lumbang No. 13 Baciro Gondokusuman	VPN1024
88	JMN004591	BPPPKP	Jl. Argolubang No. 15	VPN 1024
89	JMN004597	BSPMBPTKP	Jl. Retno Dumilah No. 23 C Pilahan Kotagede	W-VPN1024
90	JMN004684	Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial	Jl. Dr Sardjito No. 5	VPN 1024
91	JMN004685	Panti Sosial Karya Wanita	Ds Cokrobedog Sidoarum Godean	W-VPN1024
92	JMN004686	Panti Sosial Bina Karya	Jl. Sidomulyo TR IV No. 369 Yogyakarta	W-VPN1024
93	JMN004687	Panti Sosial Bina Remaja	Tridadi Beran Sleman	W-VPN1024
94	JMN004688	Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jl. Gondosuli No. 2 B	VPN 1024
95	JMN004689	Panti Sosial Asuhan Anak	Jl. Kepek Raya Wonosari	W-VPN1024

No	Nomor ID JMN	Nama	Alamat	Layanan
96	JMN004690	Pelabuhan Perikanan Pantai	Sadeng Songbanyu Girisubo Gunungkidul	W-VPN1024
97	JMN004691	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Kenari	VPN 1024
98	JMN004808	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	Jl. Gondosuli No. 6	VPN 1024
99	JMN004809	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	Jl. Gondosuli No. 6	VPN 1024
100	JMN004841	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar	Jl. Sorowajan Baru No. 1	CORP/VPN1024
102	JMN004990	Jembatan Timbang Taman Martani	Taman Martani Kalasan	W-VPN1024
103	JMN004991	Jembatan Timbang Kalitirto	Kalasan Sleman Yogyakarta	W-VPN1024
104	JMN004992	Jembatan Timbang Kulwaru	Kulwaru, Kulonprogo	W-VPN1024
105	JMN004993	Balai Rehabilitasi terpadu Penyandang Disabilitas	Piring Srihardono Pundong	W-VPN1024
106	JMN004995	Balai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Dinas PU ESDM	Jl. Bantul km. 8	W-VPN1024
107	JMN005040	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Jl. Argolubang No. 19	VPN 1024

Sumber: JMN 2013

Keterangan: W-VPN1024 : Wireless
 VPN 1024 : Kabel Coaxial (HFC)
 VPN-CORP : FO JMN